

**TINGKAT PEMAHAMAN PEGAWAI KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
TERHADAP STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN**

TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sains Terapan
pada Jurusan Akuntansi Program Studi Akuntansi Pemerintahan

Oleh :

FITRAH MULYANI

06096027



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI PEMERINTAHAN
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2009



No. Alumni Universitas	Fitrah Mulyani	No. Alumni Fakultas
------------------------	----------------	---------------------

a). Tempat/Tgl.lahir: Padang, 21/11/1988 b). Nama Orang Tua: Fauziz. A dan Rahimah c). Fakultas: Politeknik d). Jurusan: Akuntansi Pemerintahan e) NBP: 06096027 f). Tgl.Lulus: 20 Agustus 2009 g) Predikat Lulus:h). IPK: 3,25.i) Lama Studi : 32 bulan k) Alamat orang tua: Jl. Maransi Gang Cendrawasih No.68 Aia Pacah Padang

Tingkat Pemahaman Pegawai Keuangan Pemerintah Kabupaten Solok terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan

Tugas Akhir DIV oleh Fitrah Mulyani.

Pembimbing 1.Gustati, SE. Ak., 2. Elfitri Santi, SE. M.Kom. Ak

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman pegawai keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan, yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat pemahaman pegawai keuangan terhadap masing-masing PSAP (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan), dari PSAP 01 hingga PSAP 11. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuisioner kepada 87 responden yang telah ditentukan, untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepala subbagian akuntansi/penatausahaan keuangan dan 2 orang staf subbagian akuntansi/penatausahaan keuangan pada 29 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Solok. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif untuk memberikan penjelasan yang memudahkan dalam menginterpretasikan hasil analisis lebih lanjut. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan skala likert 4 point. Berdasarkan penelitian ini dapat diketahui bahwa pada umumnya pegawai keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok telah cukup paham terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tugas Akhir telah dipertahankan didepan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 20 Agustus 2009. Abstrak telah disetujui oleh penguji:

Penguji:

Tanda Tangan	1	2	3	4
Nama Terang	Zahara, SE, M.Ak, Ak	Eliyanora, SE, M.Ak, Ak	Uifi Maryati, SE, M.Ak, Ak	Gustati, SE Ak

Mengetahui:
Ketua Jurusan Nurul Fauzi, SE, MM. Ak
Nama



Alumnus telah mendaftarkan ke Fakultas/Universitas Andalas dan mendapat Nomor Alumnus

Nomor Alumnus Fakultas	Nama	Tanda Tangan
Nomor Alumnus Universitas	Nama	Tanda Tangan

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Krisis nasional bangsa yang diiringi dengan bergulirnya reformasi salah satunya disebabkan oleh kegagalan mengembangkan sistem penyelenggaraan negara dan pembangunan dimana tidak mengindahkan prinsip-prinsip *good governance*. Seiring dengan hal tersebut dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah menggantikan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Sehingga lahir paradigma baru dalam pengelolaan keuangan daerah, dengan diberikannya kewenangan yang luas kepada Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan semua urusan Pemerintah.

Good governance merupakan penyelenggaraan pemerintah yang solid dan bertanggung jawab, efisien dan efektif, akuntabilitas dan transparansi. Transparansi berarti keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang berkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi, baik informasi keuangan maupun informasi lain yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial maupun politik (Wahyundaru, 2001).

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah, untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2005: 20).

Akuntabilitas publik daerah adalah pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah daerah kepada pihak-pihak yang berkepentingan (forum dosen akuntansi sektor publik, 2006: 32).

Partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya telah diberikan oleh pemerintah pusat melalui otonomi daerah sebagai bagian dari semangat *good governance*. Partisipasi masyarakat sangat penting dan dibutuhkan didalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Karena APBD adalah arah kebijakan pemerintah daerah yang diwujudkan dalam langkah-langkah nyata pembangunan daerah (Jagat, 2006).

Pemerintah dalam pengambilan keputusan memerlukan informasi akuntansi salah satunya berupa laporan keuangan. Selaku pengelola dana publik maka Pemerintah Daerah harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu dan dapat dipercaya. Untuk itulah dituntut adanya sistem informasi yang andal.

Berikut ini terdapat tulisan yang dikutip dari beberapa artikel, yang menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan, antara lain sebagai berikut:

1. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengatakan bahwa karena kurangnya tenaga akuntansi dan manajemen keuangan maka pemerintah daerah tidak akan mampu menyusun laporan keuangan secara mandiri, sesuai dengan sistem anggaran dan laporan keuangan yang berlaku (Detikfinance,17/11/2008).

Hal di atas juga telah dijelaskan dalam buku Forum Dosen Sektor Publik, bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) membutuhkan daya dukung teknologi serta sumber daya manusia yang memiliki latar

belakang pendidikan akuntansi yang memadai. Padahal beberapa daerah belum memiliki kesiapan untuk itu, karena masih sangat sedikit jumlah akuntan atau pegawai yang berpendidikan tinggi akuntansi pemerintahan.

2. Jakarta: Sebanyak 72 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) mendapat opini *disclaimer* atau opini tidak memberikan pendapat dengan alasan buruknya kualitas laporan keuangan. Hal tersebut berdasarkan laporan BPK (Kompas, 18/05/2009).

Berdasarkan kekurangan diatas secara keseluruhan dapat diketahui bahwa pemahaman pegawai keuangan pemerintah, untuk dapat menyusun laporan keuangan pemerintah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan masih perlu ditingkatkan. Dona (2007) melakukan penelitian tentang Tingkat Pemahaman Karyawan Pemerintah Kota Padang terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan. Dari penelitian tersebut diketahui bahwa pada umumnya Karyawan Pemerintah Daerah Kota Padang sudah paham terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan.

Akuntansi sebagai salah satu bidang ilmu yang memberikan pengetahuan tentang tata cara pengelolaan dan pemanfaatan dana yang akan dapat memberikan informasi kepada berbagai pihak tentang pelaksanaan kegiatan ekonomi baik oleh pelaku ekonomi swasta maupun pemerintah sendiri. Untuk menghasilkan informasi akuntansi, suatu organisasi atau lembaga perlu menyelenggarakan proses akuntansi yang formal, maka aktivitas proses akuntansi merupakan sesuatu fungsi khusus yang harus terdapat dalam organisasi yang biasanya dilakukan oleh bagian akuntansi (Dona, 2007).

Ilmu akuntansi adalah ilmu yang mencatat kejadian-kejadian ekonomi. Salah satu kelompok ilmu akuntansi adalah akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan mengkhususkan pencatatan dan pelaporan atas transaksi-transaksi yang

terjadi pada badan pemerintahan, adapun tujuan kegiatannya adalah tidak untuk mencari laba (Dona, 2007).

Untuk melaksanakan akuntansi pemerintahan maka diperlukan suatu standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Pemerintah menerbitkan standar ini pada Rabu tanggal 6 Juli 2005 dengan nama Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005. Untuk itu Pemerintah Indonesia diharapkan memasuki era baru yang transparansi dan akuntabilitas di bidang keuangan negara (forum dosen akuntansi sektor publik, 2006: 1).

Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan dijelaskan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan prinsip-prinsip penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintahan disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, setelah mendapat pertimbangan terlebih dahulu dari Badan Pemeriksaan Keuangan.

Standar Akuntansi Pemerintahan yang terdiri dari dari satu kerangka konseptual dan 11 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP). Kesebelas PSAP tersebut adalah:

1. PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan
2. PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran
3. PSAP 03 Laporan Arus Kas
4. PSAP 04 Catatan Atas Laporan Keuangan
5. PSAP 05 Akuntansi Persediaan
6. PSAP 06 Akuntansi Investasi
7. PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap
8. PSAP 08 Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan

BAB LIMA

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Dilihat dari analisa data secara keseluruhan dapat disimpulkan sebagian besar pegawai keuangan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok sudah memiliki pengetahuan yang memadai terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai rata-rata yang diperoleh oleh masing-masing badan/dinas/kantor seluruh instansi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Solok, pada umumnya telah paham terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan.

Berdasarkan perumusan masalah, tujuan penelitian, analisa data dan pembahasan, dapat diperoleh kesimpulan dari 11 komponen yang menentukan pemahaman pegawai keuangan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu sebagai berikut:

1. Pegawai keuangan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok paham terhadap PSAP No.01 tentang Penyajian Laporan Keuangan.
2. Pegawai keuangan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok paham PSAP No.02 tentang Laporan Realisasi Anggaran.
3. Pegawai keuangan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok paham terhadap PSAP No.03 tentang Laporan Arus Kas.
4. Pegawai keuangan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok paham terhadap PSAP No.04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Artikel. 2009. *Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Memburuk*.
www.kompas.com
- Artikel. 2008. *Akuntansi Pemerintahan: Perbedaan dengan Akuntansi Bisnis*.
Syukriy Abdullah. www.google.com
- Artikel. 2008. *Paper Akuntansi Pemerintahan*. Indoskripsi. www.google.com
- Artikel. 2008. *Pemda Tidak Mampu Menyusun Laporan Keuangan Jika Kurangnya Tenaga Akuntansi*. Detikfinance. www.yahoo.com
- Artikel. 2001. *Akuntansi Sektor Publik dalam Otonomi Daerah*. Sri Dewi Wahyundaru. www.google.com
- Dona, Triska. 2007. *Tingkat Pemahaman Karyawan Pemerintah Daerah Kota Padang Terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan*. Universitas Andalas, Padang.
- Forum Dosen Akuntansi Sektor Pablik, *Standar Akuntansi Pemerintahan: Telaah Kritis-PP No.24 Tahun 2005*. BPFE: Yogyakarta
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah: Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat: Jakarta.
- Hasan, Iqbal. 2005. *Pokok-pokok Materi Statitik: Statistik Deskriptif*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Jagat. 2006. *Persepsi Pemerintah Daerah Kabupaten Serang Terhadap Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah*. Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2005. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi: Yogyakarta.